

DAFTAR PUSTAKA

1) Buku

- A. Ubaedillah, dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Edisi Revi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Esparraga, Francisco, dan Ian Ellis-Jones. *Administrative Law Guidebook*. Oxford University Press, 2010.
- Fadjar, Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Cet. Kedua. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017.
- Isharyanto, S H. “Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik.” Yogyakarta: WR Penerbit, 2016.
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?* Edisi Revi. Jakarta: Konstitusi Press, 2023.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. *Menelusuri Sosiologi Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Purwati, Ani. *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Rahayu, Muji Kartika. *Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas, dan Status Demokrasi Konstitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2014.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subarsono, A G. *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ulya, Zaki. *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara: Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Aceh: Universitas Samudra, 2014.
- Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah*

Konstitusi: Konsep dan Kajian Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Wiryanto. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2019.

2) Artikel dan Jurnal Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.” In *Makalah*, 2014.

Bisariyadi, Bisariyadi. “Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 473–502.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1233>.

Fauzani, Muhammad Addi, dan Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).

Mahfud, Moh. “Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, dan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. “Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara Dalam UUD 1945: Rekonseptualisasi Constitutional.” In *Kajian Akademik*. Jakarta: Badan Pengkajian MPRI RI, 2022.

Octavia, Nurul Aini. “Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat yang dianut Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Kesalahan Teoritik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2022): 171–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.8765>.

Tauda, Gunawan A. “Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 26688.

Wibowo, Mardian.. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 196–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1221>.

3) Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Hakim, dan Risalah Sidang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4) Wawancara dan Diskusi

Abdul Ghofar, S.H., M.H, selaku Asisten Ahli Hakim dan Peneliti Mahkamah Konstitusi, wawancara pada Selasa, 28 November 2023

Mardian Wibowo S.H., M.Si, selaku Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi, wawancara pada Rabu, 15 Desember 2023.

Prof. Dr. Martitah M.Hum, pendapat dalam Webinar Nasional yang diadakan oleh Pusat Kajian Hukum, Konstitusi dan Pancasila Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Selasa, 7 November 2023.

5) Situs Internet

Mahkamah Konstitusi. “Uji Ketentuan Persyaratan Pimpinan KPK Diputus”,
Siaran Pers, Mei 25, 2023

Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”,
September 24, 2023.
<https://ww.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU%menu=18>

LAMPIRAN

- Surat Permohonan Riset Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 981 /UN7.FI/AK/X/2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

31 OCT 2023

Yth. Sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
u.p. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Jl. Medan Merdeka barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10110

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitiandilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Didi Prasetyo
NIM : 11000120140734
alamat : Jl. Tembalang Sel. III No. 80A, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah
nomor HP : 0895360281861
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Pengesampingan *Open Legal Policy* Lembaga Pembentuk Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022)

Demikian permohonan kami, atasperhatiandankerjasamanyadisampaikanterimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

- Surat Keterangan Telah Dilaksanakannya Penelitian



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 31/PP.00/01/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya
NIP : 19821224 200604 1 005
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai berikut:

Nama : Didi Prasetyo
NIM : 11000120140734

Sesuai dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor : 981/UN7.F1/AK/X/2023 perihal Permohonan Riset dan Penelitian, dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Mahkamah Konstitusi dengan Proposal berjudul **“Pengesampingan Open Legal Policy Lembaga Pembentuk Undang-Undang Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Kasus Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022)”**.

Adapun seluruh substansi yang terkandung di dalam penelitian tersebut, merupakan sepenuhnya tanggungjawab penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Januari 2024
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Pan Mohamad Faiz Kusuma W - NIP:198212242006041005

Digital Signature
mk456342844240110121245

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: Office@mkri.id